

BAB 7

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Kebijakan Umum

Perumusan arah kebijakan dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain:

1. Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus.
2. Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran
3. Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Untuk menjalankan strategi pembangunan daerah tahun 2006-2011, diperlukan Kebijakan Umum untuk memayungi pelaksanaan program-program kerja pembangunan. Kebijakan umum pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam bentuk prioritas-prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Kebijakan umum Pembangunan Daerah Kabupaten Demak tahun 2012-2016 meliputi :

1. **Kebijakan umum yang terkait dengan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel.**

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dibutuhkan suatu sarana dan lingkungan yang kondusif bagi seluruh komponen masyarakat Demak. Dari sisi aparatur pemerintah Kabupaten Demak, perlu dibangun suatu tata pemerintahan yang baik sebagai sarana untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Penciptaan Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Demak, menjadi suatu keharusan agar kepercayaan masyarakat dapat diperoleh kembali.

Suatu Kepemerintahan yang Baik akan dapat terwujud jika dapat dibangun pilar-pilar Good Governance, yaitu terbangunnya Akuntabilitas yang baik, adanya Transparansi dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki dan mengedepankan Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, antara lain melalui pengembangan prinsip-prinsip demokrasi. Pilar-pilar tersebut akan dibangun secara bertahap pada pemerintah kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Kebijakan umum yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel di kabupaten Demak adalah meliputi:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan administrasi daerah.
2. Pengawasan yang efektif dan memadai.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2. **Kebijakan umum yang terkait dengan peningkatan kualitas Sumber daya manusia.**

Dengan semakin tingginya tingkat persaingan usaha, cepatnya perkembangan teknologi dan semakin tingginya tuntutan akan kualitas hasil kerja, mengharuskan masyarakat Demak untuk selalu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian yang dimilikinya. Untuk mencapai kualitas SDM Kabupaten Demak yang berkualitas didukung oleh sektor pendidikan, sektor kesehatan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial yang tepat.

Kebijakan umum yang terkait dengan hal tersebut adalah meliputi:

1. Peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan terutama bagi penduduk miskin.
3. Pembinaan dan perlindungan masalah kesejahteraan sosial.

3. **Kebijakan umum yang terkait dengan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.**

Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan, maka diperlukan suatu sistem ketahanan pangan yang mampu mempertahankan kuantitas (jumlah

pasokan/ketersediaannya) dan kualitas (gizinya) pada tingkat yang aman dan memadai. Sementara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dikembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada. Sektor perekonomian yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (padat karya) seperti sektor pertanian dalam arti luas, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri terutama industri kecil dan menengah dan perdagangan serta sektor pariwisata mempunyai kontribusi yang besar dalam PDRB Kabupaten Demak, sehingga diharapkan pengembangan pada sektor tersebut akan dapat mendorong sektor lain untuk meningkat, sehingga dapat mewujudkan daya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan umum yang terkait dengan hal tersebut adalah meliputi:

1. Peningkatan investasi dan Pembinaan BUMD
2. Revitalisasi Pertanian
3. Pengembangan Potensi Kelautan dan Perikanan
4. Peningkatan Daya saing industri, perdagangan, koperasi dan UMKM.
5. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Penciptaan Obyek Wisata Relijius Unggulan.

4. Kebijakan umum yang terkait dengan investasi dan kesempatan kerja.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dan berkesinambungan yang didorong oleh sumber-sumber pertumbuhan yang berkualitas yang utamanya digerakkan oleh sektor riil. Agar hal tersebut dapat diwujudkan, maka investasi baik dalam negeri maupun luar negeri harus meningkat. Untuk mendorong investasi yang lebih tinggi maka diarahkan untuk penghapusan ekonomi biaya tinggi, antara lain dengan menyederhanakan dan mempercepat prosedur perijinan investasi, termasuk bagi UKM, menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

Kebijakan yang terkait dengan hal tersebut adalah meliputi:

1. Melakukan promosi investasi
2. Peningkatan kualitas perijinan investasi

3. Pembinaan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

5. Kebijakan umum yang terkait dengan kehidupan beragama dan kebangsaan

Dalam melaksanakan pembangunan , setiap komponen masyarakat, baik aparatur, dunia usaha maupun masyarakat Kabupaten Demak diharapkan dapat bekerja dengan berlandaskan akhlak dan nilai-nilai agama yang kuat. Perilaku keseharian dalam bekerja maupun membina keluarga selalu bernafaskan semangat yang mengedepankan kejujuran, keadilan, profesionalisme dan mengedepankan penciptaan kedamaian dalam lingkungan. Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketentraman antar umat beragama juga dibutuhkan toleransi beragama yang baik, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan menjaga toleransi dalam kehidupan umat beragama diharapkan membawa kedamaian dalam kehidupan di masa mendatang.

Untuk itu dalam kebijakan umum yang terkait hal keagamaan dan kebangsaan adalah meliputi:

- a. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama .
- b. Peningkatan kualitas hidup kebangsaan.

6. Kebijakan umum yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian pertumbuhan penduduk

Untuk mengatasi permasalahan kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan diperlukan pembangunan pemberdayaan perempuan yang disebut dengan pengarusutamaan gender. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan permasalahan terhadap hak-hak anak mencakup hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan,

perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi diupayakan dengan Pembangunan kesejahteraan & perlindungan anak.

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk mengendalikan kuantitas penduduk maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumberdaya manusia. Pengendalian pertumbuhan penduduk juga merupakan faktor penting dalam peningkatan keluarga kecil yang berkualitas. Permasalahan utama di bidang kependudukan adalah masih tingginya laju pertumbuhan penduduk. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk tersebut.

Untuk itu dalam kebijakan umum yang terkait hal pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian pertumbuhan penduduk adalah meliputi:

- a. Peningkatan Kualitas Kehidupan Perempuan dan Anak .
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan Keluarga Berencana

7. Kebijakan umum yang terkait dengan potensi pemuda, olahraga dan seni budaya

Pembangunan Pemuda dan Olah Raga mempunyai peran yang strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggungjawab serta pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas pemuda saat ini. Untuk itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar memiliki kualitas dan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan dan tantangan di era global. Sedangkan pembangunan keolahrgaan ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi , kualitas manusia , menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin , mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Masa depan seni dan budaya daerah di Indonesia bisa jadi di ambang kehancuran, di era reformasi saat ini kita sangat merasakan bahwa semangat disintegrasi bangsa justru disebabkan proses globalisasi yang datang dengan cepat. Masyarakat semakin mengglobal, pengaruhnya apresiasi budaya daerah oleh

masyarakat semakin goyah. Hal ini sejalan dengan mengendurnya repon masyarakat terhadap seni budaya sendiri, dengan anggapan budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya sendiri yang kuno dan tradisional. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah arus globalisasi saat ini.

Untuk itu dalam kebijaka umum yang terkait hal potensi pemuda, olahraga dan seni budaya adalah meliputi:

- a. Peningkatan Pembinaan Peran Organisasi Kepemudaan .
- b. Peningkatan Budaya dan Prestasi Olah Raga
- c. Peningkatan Pelestarian Seni dan Budaya Tradisional

8. Kebijakan umum yang terkait dengan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial

Pembangunan infrastruktur berperan sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi terutama sebagai katalisator di antara proses produksi, pasar dan konsumen akhir yang keberadaannya dapat merefleksikan kemampuan berproduksi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta merupakan modal sosial bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Ketersediaan infrastruktur Pekerjaan Umum yang merupakan bangunan fisik untuk kepentingan umum dan keselamatan umum seperti : jalan, irigasi, air bersih, sanitasi, dan berbagai bangunan pelengkap kegiatan pemukiman lainnya, merupakan prasyarat agar berputarnya roda ekonomi dengan baik. Agar dapat berfungsi dengan baik berbagai upaya dilakukan untuk menyediakan infrastruktur yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan dalam mendukung ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu dalam kebijaka umum yang terkait hal kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial adalah :

- a. Peningkatan Daya Dukung Kualitas Infrastruktur
- b. Peningkatan ketersediaan perumahan layak huni bagi masyarakat dan fasilitasnya. .
- c. Peningkatan fasilitas perhubungan , pos dan telekomunikasi.
- d. Peningkatan daya dukung dan kualitas infrastruktur perdesaan
- e. Peningkatan mutu lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan

9. Kebijakan umum yang terkait dengan pembangunan pedesaan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis

Berbagai persoalan pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan wilayah disebabkan kurang baiknya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pedesaan. Pedesaan yang menjadi tempat tinggal mayoritas masyarakat belum berfungsi sebagai basis dalam penyiapan sumber daya manusia yang handal yang dapat menjawab berbagai tantangan dan peluang pembangunan. Pembangunan pedesaan yang baik akan memberikan peluang bagi setiap individu yang ada untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk itu perlunya direncanakan dengan baik pembangunan pedesaan dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan.

Suatu kawasan strategis adalah suatu kawasan ekonomi yang secara potensial memiliki efek ganda yang signifikan secara lintas sektoral, lintas spasial dan lintas pelaku. Dengan demikian, perkembangan wilayah strategis memiliki efek sentrifugal karena dapat menggerakkan secara efektif perkembangan ekonomi sektor-sektor lainnya, perkembangan wilayah di sekitarnya serta kemampuan menggerakkan ekonomi masyarakat secara luas, dalam arti tidak terbatas ekonomi masyarakat kelas-kelas tertentu saja.

Pengembangan kawasan strategis sangat diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan melalui pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan kawasan regional, nasional dan global.

Untuk itu dalam kebijakan umum yang terkait hal pembangunan pedesaan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis adalah :

- a. Peningkatan percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa
- b. Peningkatan perencanaan , pengendalian pemanfaatan tata ruang serta daya dukung pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

10. Kebijakan umum yang terkait dengan kehidupan demokrasi

Demokrasi kita terkonsolidasi apabila ia mendapat legitimasi yang luas dan kuat dari warga sehingga sangat kecil kemungkinan ia ambruk. Adanya legitimasi yang kuat dari warga, atau adanya penerimaan sebagai satu-satunya aturan main dalam membangun

dan melaksanakan pemerintahan tersebut ditandai oleh tidak signifikannya perilaku menentang demokrasi dari kekuatan-kekuatan yang ada, tumbuhnya keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik, dan berfungsinya negara secara efektif dalam penegakan hukum. Untuk itu perlu adanya upaya untuk membina kehidupan demokrasi yang sudah berjalan dengan baik setelah reformasi tahun 1998.

Untuk itu dalam kebijaka umum yang terkait hal kehidupan demokrasi adalah :

Peningkatan kehidupan demokrasi dan supremasi hukum.

7.2 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan merupakan kumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

Program pembangunan daerah Kabupaten Daerah berdasarkan kebijakan umum adalah sebagai berikut:

1. Program pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5. Program pengelolaan keuangan dan asset daerah
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
8. Program peningkatan kualitas mutu pendidikan dan budaya minat baca.
9. Program peningkatan dan pengawasan mutu obat dan makanan.
10. Program jaminan kesehatan masyarakat daerah
11. Program upaya kesehatan masyarakat

12. Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial
13. Program pembinaan koperasi dan UMKM
14. Program peningkatan produksi pertanian
15. Program peningkatan kesejahteraan petani
16. Program ketahanan pangan
17. Program peningkatan produksi peternakan dan perikanan
18. Program pengembangan pariwisata
19. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
20. Program peningkatan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja.\
21. Program peningkatan wawasan kebangsaan dan kehidupan beragama.
22. Program pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan
23. Program Peningkatan pembinaan dan pelayanan keluarga berencana
24. Program pembinaan dan peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan
25. Program Peningkatan budaya dan prestasi olahraga
26. Program pelestarian seni dan budaya tradisional
27. Program Peningkatan kualitas infrastruktur
28. Program Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
29. Program Pengembangan sumber daya energy
30. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
31. Program Peningkatan struktur tata ruang
32. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
33. Program Pendidikan Politik Rakyat dan Penegakan Hukum